

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tempat pengembangan bisnis kewirausahaan karena UMKM mampu meningkatkan ekonomi yang bersifat karya beroyentasi pada ekspor dan substitusi impor yaitu struktur dan perolehan devisa (Wildan, 2017). UMKM juga memberikan dampak bagi sektor perbankan dalam memberikan pinjaman sebagai pembiayaan untuk usaha karena bergerak dibidang yang cepat memberikan penghasilan. UMKM merupakan unit usaha yang tergolong kecil karena memiliki keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan kekurangan UMKM dilihat dari rendahnya manajerial dan keterbatasan sumber daya manusia yang dalam hal tersebut menyebabkan ketidak evisenan dalam kegiatan usaha. UMKM juga memiliki keterbatasan modal yang menyulitkan dalam pengembangan usaha. Kekurangan yang sering di alami UMKM yaitu strategi pemasaran, penguasaan informasi keterbatasan teknologi dan pengetahuan produksi, sarana dan prasarana dalam pengembangan usaha.

UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang bisa berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasiaonal (Halim, 2020). UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting perkembangan perekonomian Indonesia, karena UMKM merupakan usaha yang jumlahnya lebih banyak daripada usaha industry berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih besar serta mampu memproses mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan perekonomian nasional (Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, 2020). UMKM dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 telah berkontribusi dalam menyerap 97% dari

total tenaga kerja dan memiliki porsi investasi sebesar 60,4% (Indonesia, 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM telah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

UMKM dalam menghadapi persaingan pasar global cukup sulit, karena produk UMKM memiliki banyak hambatan. Hambatan dan rintangan yang sedang dihadapi saat ini adalah pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti: minimnya permodalan baik dari jumlah maupun sumbernya, kurangnya keahlian manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formal dari perusahaan, lemahnya organisasi serta keterbatasan dalam pemasaran (Anggraini dan Syahrir, 2020). Apalagi jika adanya krisis ekonomi, UMKM yang dikategorikan usaha kecil merasakan perubahannya. Tentunya, hambatan-hambatan yang dirasakan UMKM menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam membantu UMKM untuk tetap bertahan dengan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

Kota Sidoarjo merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dengan jumlah UMKM yang cukup besar. Sidoarjo memiliki UMKM dengan jumlah besar. UMKM di Sidoarjo tercatat sebesar 64,2 juta yang mana 99,99% berkontribusi besar terhadap PDB sebesar 61,1% (Syahril, 2021). Daya serap UMKM berjumlah 117 juta pekerja atau 97% dari dunia kerja usaha. Hal tersebut menjadikan upaya pengembangan UMKM menjadi suatu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah (Muhlison, 2021). Apalagi adanya pandemi covid-19 sedikitnya ada sekitar 248 ribu UMKM Sidoarjo yang sedang berjuang menghadapi pandemi covid saat ini (Muhlison, 2021).

Pemerintah telah menyadari berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM terutama dari segi permodalan (Aristanto,2019). Pemerintah tentunya memerlukan langkah-langkah strategis untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi UMKM, salah satunya melalui pembiayaan UMKM dengan tujuan untuk membantu memberikan permodalan dengan bentuk kredit. Pembiayaan kredit untuk UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai rivisi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite-Komite Kebijakan Pembiayaa Bagi UMKM.

Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan program pemerintah yang ditujukan UMKM dalam mendukung pengembangan UMKM yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan dari kreditur, tetapi kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur (Marfuah dan Siti, 2019). KUR pada tahun 2020 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bekerjasama lembaga keuangan yaitu Bank pemerintah Bank swasta, Bank pembangunan daerah , koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan. KUR merupakan fasilitas pembiayaan untuk UMKM dan Koprasi khususnya yang memilik usaha yang layak tetapi tidak mampu memenuhi pesyaratan pembiaan sesuai ketentuan Bank. Realisasi penyaluran KUR periode April 2021 sebesar Rp 88.089.649.286.914 yaitu 34,82% dari target Rp 253 Triliun berdasarkan data dari Komite KUR pada bulan April 2021. BRI tercatat sebagai penyalur KUR terbesar dengan realisasi sebesar Rp 58.397.886.002.261,- dari 2.092.475 debitur (Komite KUR, 2021).

Pelaksanaan Program Pemerintah KUR ini merupakan program yang seharusnya dapat dimanfaatkan UMKM dalam mengembangkan usahanya, namun tentunya dari UMKM sektor kecil mengalami kekurangan akses informasi. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan tahap-tahap pelaksanaan Program KUR BRI dalam mengembangkan UMKM khususnya di Sidoarjo. Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil bahwa KUR dapat membantu pelaku UMKM dalam peningkatan permodalan usaha serta keberlanjutan usaha (Aristanto, 2019) dan (Ratni dkk, 2021) menyimpulkan bahwa nasabah bisa mengajukan langsung dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan program KUR di Bank BRI ?
2. Bagaimana perkembangan UMKM di Sidoarjo setelah mendapatkan KUR ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tahap-tahap pelaksanaan program KUR di Bank BRI.
2. Untuk mengetahui perkembangan UMKM di Sidoarjo setelah mendapatkan KUR.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dapat mengetahui pelaksanaan program KUR BRI dan mengetahui perkembangan UMKM di Sidoarjo setelah mendapatkan KUR.
2. Bagi instansi yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pelaksanaan program KUR di Bank BRI dalam mengembangkan UMKM di Sidoarjo.

3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yaitu memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai pelaksanaan Program KUR dalam mengembangkan UMKM di Sidoarjo.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

1.5.1 Fokus Penelitian

Latar belakang yang telah dikemukakan fokus penelitian ini adalah pelaksanaan program KUR BRI dalam mengembangkan UMKM di Sidoarjo.

1.5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dan pengumpulan datanya menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu subjektivitas peneliti. Dalam hal ini pada penelitian ini sangat bergantung kepada narasumber tentang informasi yang ada dalam wawancara. Data yang didapatkan melalui wawancara hanya dengan pihak UMKM di Sidoarjo dan data pelaksanaan KUR BRI terbatas hanya data melalui dokumentasi yang telah disediakan oleh BRI.

